INSIGHT

Islamic Economy Bulletin

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi Syariah

Pentingnya Literasi Halal dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia

INSIGHT | Edisi Kelima Belas | Desember 2023

4 FOKUS UTAMA Pentingnya Literasi Halal dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia

INSIGHT
Islamic Economy Bulletin

Edisi Kelima Belas
Desember 2023

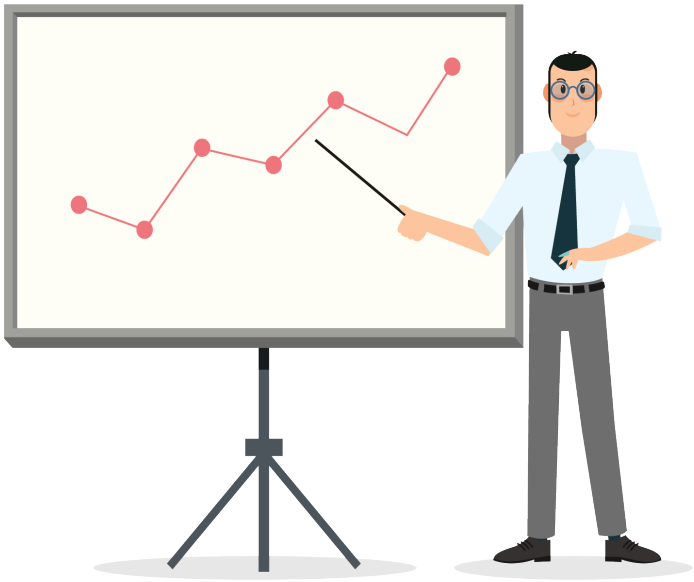

WAWANCARA

8 **Kemenperin: Industri Nasional Bersiap Wajib**
Mohammad Ari Kurnia Taufik, SE., MInfT
Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH)
Kementerian Perindustrian RI

14 **Strategi Bangun Kesadaran Gaya Hidup Halal Pada Masyarakat**
Ir Elvina A. Rahayu, MP
Ketua Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI)

19 **Peran Akademisi dalam Mendorong Inovasi dan Riset di Bidang Sains Halal**
Prof. Setiyo Gunawan ST., Ph.D
Ketua Pusat Studi Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

25 **Kewajiban Sertifikasi Halal Membuat Industri Kesehatan Semakin Menjamin Kebaikan**
Drs. R. Bambang Irawan, Apt.
GM Quality Operation dan Sebagai Penyelia Halal PT Phapros

AKADEMIA

23 **Menggali Makna: Urgensi Literasi Halal dalam Kehidupan Modern**
Muhammad Assagaf
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Maluku Utara

37 **Upaya Peningkatan Literasi Produk Halal Melalui Sinergi *Halal Lifestyle* dan Median**
Andrian Haro
Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta
Pendamping Proses Produk Halal (PPH),
Universitas Indonesia Halal Center

INSIGHTFUL

29 **Pengembangan Industri Kesehatan Berkompetensi Syariah**

34 **Program KNEKS dalam Pengembangan Industri Kesehatan Berkompetensi Syariah**

35 **Implikasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

36 **Implementasi Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan**

SAMBUTAN

Sutan Emir Hidayat

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Bismillahirahmanirrahim

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Buletin Insight ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi seluruh ummat manusia.

Literasi halal adalah salah satu landasan terpenting untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan dan berkeadilan. Di tengah dinamika pasar global yang terus berkembang, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip serta implikasi dari produk dan layanan yang halal menjadi krusial. Hal ini tidak hanya penting dari sudut pandang agama, tetapi juga dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya literasi halal, peluang besar bagi pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan, kebersihan, dan kesejahteraan bersama juga akan terbuka lebar. Hal ini tidak hanya mencakup sektor makanan dan minuman, tetapi juga di sektor lainnya seperti keuangan, pariwisata, farmasi, kosmetik dan industri lainnya.

Dalam konteks ekonomi, keberlanjutan bisnis yang mengikuti prinsip halal akan berdampak positif, menciptakan lingkungan usaha yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memahami konsep literasi halal di bidang ekonomi, kita dapat menciptakan lapangan kerja yang memberikan manfaat, mengembangkan perekonomian umat, dan menghindari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dalam hubungan sosial, literasi halal juga berperan penting dalam membentuk karakter dan moralitas masyarakat. Masyarakat yang menerapkan konsep halal cenderung lebih peduli terhadap kebenaran, saling menghargai, dan berusaha menjauhkan diri dari segala bentuk yang dilarang oleh agama.

Oleh karena itu, mari tingkatkan pemahaman dan kesadaran tentang literasi halal. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya halal perlu ditingkatkan, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat umum. Dengan literasi halal yang kuat, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan kehalalan dalam segala aspek kehidupan.

Terakhir, sebagai bagian dari upaya bersama, mari kita terus mendukung dan memperjuangkan peningkatan literasi halal. Dengan demikian, kita tidak hanya mengangkat nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi, tetapi juga memastikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkesinambungan bagi Indonesia. Semoga literasi halal menjadi dasar yang kuat menuju kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Sutan Emir Hidayat

Dewan Redaksi/Pakar

Taufik Hidayat
Ahmad Juwaini
Putu Rahwidhiyasa

Pimpinan Redaktur

Inza Putra

Redaktur Pelaksana

Ishmah Qurratu'ain

Redaktur

Ni Putu Desinthya
Afifah Tsurayya
Ryanda Al Fathan
Pipie Puspitasari
Stefany
Lidya Dewi Nurjannah

Desain & Layout

Tim KNEKS

FOKUS UTAMA

Pentingnya Literasi Halal dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin menyampaikan, target Indonesia menjadi pusat halal dunia ini adalah upaya untuk mendorong industri dan keuangan syariah sebagai arus baru ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikannya saat Rapat Pleno KNEKS Ketiga di Istana Wakil Presiden pada Selasa (20/12/2022).

Menurut data *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) 2023, jumlah populasi Muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari populasi penduduk nasional yang mencapai 277,53 juta jiwa. Hal ini menjadi salah satu potensi yang besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Potensi dari jumlah penduduk Muslim yang besar itu diyakini bakal mendorong kebutuhan produk halal yang besar.

Dengan begitu, dikutip dari laman resmi KNEKS, Rabu (22/11/2023), Wapres menilai bahwa industri halal perlu diwujudkan sebagai upaya untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tetapi, potensi yang besar tersebut sebaiknya bisa dimaksimalkan oleh para produsen produk-produk halal lokal untuk bisa memanfaatkan potensi pasar yang sangat besar itu. Menurut data dari *The State of the Global Islamic Economy Report* (SGIER)2023-2024, ekonomi syariah Indonesia menempati posisi ke-3 di dunia di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi ke-4 berdasarkan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi syariah melalui performa kinerja berbagai sektor halal, seperti makanan, kosmetik, farmasi, *modest fashion*, media dan rekreasi, *travel,* serta keuangan syariah.

Pada 2018, dikutip dari laman resmi Kementerian Kordinator Perekonomian, Kamis (22//11/2023), Indonesia membelanjakan US$214 miliar untuk produk halal atau mencapai 10% dari nilai total produk halal dunia. Dengan begitu, hal ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen halal terbesar di dunia dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya.

Hal tersebut perlu dijadikan catatan oleh pemerintah, produsen, dan konsumen agar memiliki kesadaran dan melakukan langkah-langkah konkrit untuk memajukan industri-industri halal di Indonesia. Jika hal tersebut dilakukan, maka para pelaku industri halal Indonesia bisa bersaing dan memenuhi tuntutan baik dari dalam dan luar negeri.

"Target Indonesia menjadi pusat halal dunia sebagai upaya untuk mendorong industri dan keungan syariat sebagai arus baru ekonomi Indonesia," kata Wapres KH Maruf Amin.

Peluang Indonesia Menjadi Produsen Industri Halal Dunia

Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi produsen industri halal dunia. Selain memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, kesadaran akan pentingnya industri halal sekarang ini bukan hanya oleh umat Muslim saja, tetapi juga non-Muslim. Contohnya, penerapan gaya hidup halal oleh masyarakat semakin meningkat tidak hanya pada sektor makanan dan minuman, tetapi sektor lainnya seperti farmasi, *fashion* dan lain-lain. Hal ini tentunya menambah peluang Indonesia untuk menjadi produsen halal terkemuka dunia yang ditargetkan terwujud pada 2024.

Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait terus berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka dunia dengan berbagai strategi dan kebijakan nasional. Stretategi dan kebijakan tersebut antara lain membentuk Kawasan industri halal, maupun zona-zona halal dalam kawasan industri yang sudah ada. Hal itu dijalankan oleh pemerintah dan pihak terkait secara simultan dan kolaboratif untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut.

Berdasarkan data dari *Global Islamic Economic Report* (GIER) 2022, pengeluaran konsumen Muslim dunia untuk makan, minum, farmasi, dan gaya hidup halal dalam beberapa tahun terakhir ini diproyeksikan mencapai US$2,8 triliun pada 2025. Jumlah penduduk Muslim dunia juga diprediksi akan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030.

Data tersebut menunjukkan bahwa industri halal diprediksi akan terus meningkat pesat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari *Global Islamic Economic Report* (GIER) 2022, besarnya data pengeluaran konsumen Muslim dunia untuk makan, minum, pariwisata, farmasi, serta gaya hidup halal dalam beberapa tahun terakhir, dan ini diproyeksikan akan terus meningkat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan, pada 2020, Indonesia telah mengekspor total US$46,7 miliar untuk produk-produk halal berupa makanan, *fashion,* farmasi dan kosmetik secara global. Meski secara agregat Indonesia dinilai masuk sebagai net exporter halal. Sedangkan ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara anggota OKI tercatat menembus US$53, 8 miliar di tahun 2022.

"Berdasarkan data-data tersebut, untuk mengoptimalkan peluang pasar produk halal dan untuk mencapai pertumbuhan produk industri halal seperti yang diharapkan, maka diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat di antara semua pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pendukung pertumbuhan industri halal nasional yang kuat," kata Agus Gumiwang dalam sambutannya pada acara *Indonesia Halal Industry Awards* (IHYA) 2023 di Jakarta, Senin (23/10).

Selain memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, kesadaran penerapan gaya halal oleh masyarakat semakin meningkat. Tidak hanya sektor makanan dan minuman, tapi sektor lain seperti farmasi, *fashion* dan lain-lain."

Bagaimana Langkah Strategis Pemerintah?

Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada 2024, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah-langkah strategis dan kongkrit. Langkah tersebut antara lain untuk meningkatkan kapasitas produk halal Indonesia bisa meningkat secara signifikan, semakin berkualitas, dan berdaya saing secara global.

Sektor industri halal yang mulai diwajibkan untuk bersertifikat halal adalah produk makanan dan minuman pada tahun 2024. Kemudian, pada tahun 2026, dilanjutkan dengan produk obat, kosmetik dan barang gunaan. Oleh karena itu, Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan sertifikasi halal sebanyak 10 juta produk pada tahun 2024.

Kawasan Industri Halal (KIH) juga diluncurkan oleh pemerintah untuk mendukung percepatan Industri halal Indonesia. Hingga saat ini, sudah ada tiga KIH yakni di *Halal Modern Valley* Serang, *Halal Industrial Park* Sidoarjo dan *Bintan Inti Halal Hub*. Kawasan industri halal tersebut di antaranya harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa tim manajemen halal, sistem manajemen halal, laboratorium halal, lembaga pemeriksa halal dan instalasi pengolahan air baku tersertifikasi halal.

Selain itu, pada 26 Oktober 2023, Wakil Presiden RI yang juga Ketua Harian KNEKS Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin meluncurkan *Master Plan* Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029 yang mengusung tema: Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan perkembangan kondisi dunia dan arah tranformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi besar menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka dunia 2024.

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dan kongkrit dengan meningkat kapasitas produk halal Indonesia secara signifikan, semakin berkualitas dan berdaya saing global."

Urgensi Literasi Halal

Literasi Halal memiliki urgensi yang tinggi dalam mendorong perekonomian Indonesia melalui industri halal. Literasi halal mejadi salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024. Hal ini karena literasi halal sangat penting untuk mendorong kesadaran bagi para produsen dan konsumen halal untuk menerapkan gaya hidup halal.

Potensi Indonesia yang sangat besar untuk menjadi produsen halal dunia harus diiringi dengan kesadaran konsumen untuk membeli setiap produk makanan dan minuman yang sudah berlogo halal. Dengan demikian, jika masyarakat semakin sadar akan produk halal, maka jumlah permintaan produk halal akan semakin meningkat yang diiringi dengan semakin bertumbuhnya industri halal di Indonesia.

Bila masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk membeli setiap produk yang sudah berlogo halal. Maka,potensi yang sangat besar tersebut bisa terealisasi untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia.

Perkembangan teknologi digital salah satunya melahirkan media sosial di antara fungsinya sebagai sarana interaksi masyarakat dan penyebaran informasi di dunia digital. Media sosial memilki peran yang sangat strategis karena memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Peran strategis tersebut menjadi peluang yang efektif untuk mendorong kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya literasi halal. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja baik itu *influencer*, tokoh publik maupun masyarakat secara luas untuk membagikan informasi-informasi positif seputar industri halal.

Jika hal itu dapat dilakukan, maka potensi Indonesia yang begitu besar untuk menjadi pusat halal dunia bisa terwujud. Dampaknya bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang naik secara signifikan sehingga, dapat mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Literasi halal menjadi salah satu kunci mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Karena literasi halal dapat mendorong kesadaran bagi para produsen dan konsumen untuk menerapkan gaya hidup halal.

Kemenperin: Industri Nasional Bersiap Wajib Halal

Mohammad Ari Kurnia Taufik, SE., MInfT

Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian RI

Menjelang pergantian tahun, industri tanah air harus segera bersiap untuk memasuki tahap kewajiban bersertifikat halal. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Kewajiban sertifikasi halal ini akan mulai berlaku pada tahun 2024 bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Kemudian bagi produk kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan pada tahun 2026, dan berlanjut untuk produk farmasi hingga tahun 2039.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait terus berkolaborasi dalam melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal nasional. Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal Indonesia (PPIH) Kementerian Perindustrian RI, Mohammad Ari Kurnia Taufik menyampaikan, ekosistem industri di Indonesia siap mendukung kewajiban sertifikasi halal bagi produk nasional.

"Indonesia sudah lama memberlakukan standar bagi produk konsumsi, baik melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Sistem Penjaminan Mutu (SPMI), *International Organization for Standardization* (ISO), *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), hingga Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib sebagai jaminan mutu proses produksi yang baik. Ada beberapa kesamaan yang juga bisa diterapkan dalam pelaksanaan jaminan produk halal sehingga menjamin produk tersebut halal untuk dikonsumsi," ujar Ari saat ditemui Redaksi Buletin Insight di ruang kerjanya, Selasa (31/10/2023).

Ekosistem industri halal diantaranya mencakup ketersediaan bahan baku halal, sumber daya manusia industri (SDMI) halal, Kawasan Industri Halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), logistik halal hingga lembaga keuangan yang menyediakan dukungan bagi pengembangan industri halal.

Lebih lanjut dalam penguatan ekosistem industri halal, salah satu faktor kunci berkembangnya industri halal nasional adalah melalui peningkatan literasi dan *awareness* masyarakat terhadap konsep halal. Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan jumlah populasi Muslim terbanyak di dunia. Menurut data *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) 2023, jumlah populasi Muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa, setara dengan 86,7% populasi penduduk nasional yang mencapai 277,53 juta jiwa. Indonesia membelanjakan US$214 miliar untuk produk halal atau mencapai 10% dari nilai total produk halal dunia, dimana hal ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen halal terbesar di dunia.

Di sisi lain, sebagai produsen poduk halal, potensi pengembangan industri halal nasional juga merujuk pada pertumbuhan penduduk muslim dunia. Merujuk pada *The State of Global Islamic Economy Report* (SGIER) 2023/24, sebanyak 2 milyar penduduk Muslim dunia

diperkirakan mengeluarkan sebesar US$ 2.29 T pada sektor halal, meliputi makanan, kosmetik, farmasi, *modest fashion*, media dan rekreasi, *travel*, serta keuangan syariah. Ini merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi industri halal tanah air, dan perlu untuk didukung oleh seluruh kepentingan terkait guna mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia.

Melihat industri halal sebagai bagian dari ekonomi syariah, menurut SGIER 2023/24, Indonesia berhasil naik peringkat menempati posisi ketiga setelah sebelumnya berada di posisi empat berdasarkan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi syariah melalui performa kinerja berbagai sektor halal, seperti makanan, kosmetik, farmasi, *modest fashion*, media dan rekreasi, *travel*, serta keuangan syariah.

Lebih spesifik untuk sektor makanan halal, Indonesia bertahan di peringkat 2, kemudian di sektor *modest fashion* berada di peringkat 3. Perubahan terbesar pada sektor farmasi dan kosmetik beranjak naik dari posisi 9 ke posisi 5, serta media dan rekreasi yang tahun kemarin belum masuk ke dalam posisi 10 negara unggulan, berhasil menempati posisi ke-6 pada tahun terakhir ini.

Menurut Ari, Indonesia bisa mencontoh negara lain dalam hal penerapan industri halal, bahkan melihatnya dari negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Ari melihat di negara lain adanya penerapan aturan yang berlaku secara ketat, termasuk soal penerapan industri halal. Hal tersebut bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh konsumen dan produsen.

“Salah satu cara melakukan literasi halal bagi pelaku usaha dengan terjun langsung ke negara yang yang telah menerapkan itu. Dimana konsumennya, tidak mau jika tidak halal, dan produsennya pun berlaku jujur mengenai kehalalan produknya,” pungkasnya.

Sebagai contoh, salah satu Industri Kecil dan menengah (IKM) Indonesia yang pernah membuka usaha rumah makan di luar negeri dengan menerapkan prinsip halal yang ketat. Belajar dari pengalaman itu, ketika IKM tersebut kembali ke tanah air, pengawasan ketat terhadap sistem jaminan produk halal yang telah diterapkan sebelumnya akan terus berlanjut, baik dari sisi proses maupun bahan baku.

Berkaca pada hal tersebut, dapat dilihat bagaimana negara-negara berpenduduk mayoritas non- Muslim bisa mengangkat prinsip halal, bahkan hingga mendorong negaranya menjadi tujuan wisata yang ramah muslim. Hal ini yang sebenarnya harus bisa lebih diterapkan di Indonesia, dimana prinsip halal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan pada perekonomian nasional.

Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait terus berkolaborasi dalam melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal nasional.

Langkah Strategis PPIH Kemenperin untuk Mendorong Pertumbuhan

Sebagai instansi pemerintah yang membina sektor industri, Kementerian Perindustrian secara kontinu (berkesinambungan) mendorong pengembangan industri halal nasional melalui berbagai program. Ari mengatakan, pihaknya terus melakukan langkah-langkah strategis, bahkan hingga terjun langsung ke lapangan untuk mendampingi perusahaan industri agar bisa menerapkan sistem jaminan produk halal.

"Kita yakin diluar sana masih banyak yang belum bersertifikat halal, kita akan tetap turun ke lapangan dengan mendorong fasilitasi sertifikasi halal gratis. Selain itu kita juga melakukan *coaching clinic* untuk mendampingi perusahaan industri agar bisa memproduksi produk yang halal," kata Ari.

Ari mengungkapkan, *coaching clinic* yang dilakukan oleh pihaknya ini ditujukkan tidak sebatas untuk mengejar sertifikat halal, namun juga sebagai bagian untuk meningkatkan literasi dan *awareness* pelaku industri untuk menerapkan nilai-nilai halal dalam setiap lini produksinya.

Upaya untuk meningkatkan *awareness* ini juga dilakukan melalui program Indonesia *Halal Industry Awards* (IHYA) yang merupakan apresiasi pemerintah bagi berbagai pemangku kepentingan terkait yang berperan aktif terhadap pengembangan industri halal di Indonesia, meliputi perusahaan industri, akademisi, pemerintah pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga keuangan.

Selain itu, PPIH Kemenperin juga terus mendorong akses promosi dan potensi ekspor para pelaku industri yang menerapkan proses sertifikasi halal, melalui penyelenggaraan pameran di dalam negeri maupun keikutsertaan pada pameran di luar negeri.

"Sudah saatnya kita menjadi lebih dari sekedar konsumen produk halal, namun juga mengoptimalkan industri halal kita untuk mengisi pasar global. Tahun ini kami membawa pelaku industri halal nasional ke berbagai pameran, seperti *Almaty Halal Expo* di Kazakhstan, kemudian juga *OIC Halal Expo* di Turki," ungkapnya.

Lebih lanjut Ari menyampaikan bahwa saat ini penerapan gaya hidup halal bukan hanya bagian dari keimanan dan kewajiban umat Muslim, tapi juga telah menjadi kebutuhan untuk hidup sehat bagi masyarakat global, termasuk non-Muslim. Dengan demikian, pengembangan industri halal nasional menjadi sangat potensial dengan adanya market yang heterogen. Hal ini tentunya didukung dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai *stakeholder* terkait.

"Penerapan industri halal harus dilakukan secara ketat oleh pemerintah, produsen dan konsumen. Yang kita lakukan adalah mendorong industri di Indonesia untuk menerapkan sistem jaminan produk halal sebagai acuan industri halal. Kita mendorong agar penerapan regulasi halal di Indonesia dapat berjalan, dimana aturan sertifikat halal ini dibuat untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat itu proses dan bahan bakunya halal serta aman untuk dikonsumsi," pungkas Ari.

> Kita mendorong agar penerapan regulasi halal di Indonesia dapat berjalan, dimana aturan sertifikat halal ini dibuat untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat itu proses dan bahan bakunya halal serta aman untuk dikonsumsi.

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Ekonomi Syariah
Kebaikan Untuk Semua
Industri Halal dan Jaminan Produk Halal
Kalo dipikir-pikir semua yang aku kenakan dan aku konsumsi, selalu aku cek halal atau tidak. Kamu gitu juga ga Nis?
Sama aku juga Zain, itu tuh tanda dari pentingnya industri halal Zain
Industri Halal itu produk dan jasa yang halal sesuai syariat Islam kan? terus gimana cara kita mau menjamin produk itu halal?
Tenang, saat ini Indonesia sudah memiliki regulasi mengenai Jaminan Produk Halal (JPH)
@kneks.id
@kneks_id
@kneks.id
www.kneks.go.id

Kriteria Sistem Jaminan Halal meliputi :

1. Komitmen dan Tanggung jawab
2. Bahan
3. Proses Produk Halal
4. Produk
5. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk melihat lebih detailnya lagi, sobat dapat lihat di, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Ekonomi Syariah
Kebaikan Untuk Semua
Wah sedetail itu ya, makasih ya Nisa buat sharingnya
Sama-sama Zain
@kneks.id
@kneks_id
@kneks.id
www.kneks.go.id

Strategi Bangun Kesadaran Gaya Hidup Halal Pada Masyarakat

Ir. Elvina A. Rahayu, MP
Ketua Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI)

Membangun kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup halal memerlukan berbagai strategi yang bisa dilakukan baik dari pemerintah maupun dari para pelaku industri halal di Indonesia. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang semakin sadar dalam menerapkan gaya hidup halal. Karena Indonesia menargetkan akan menjadi pusat industri halal dunia pada 2024.

Apa Itu Gaya Hidup Halal?

Gaya hidup halal adalah ketika seseorang telah menetapkan pilihan hidupnya untuk menjadi seorang Muslim yang senantiasa berupaya menjadi Muslim yang baik. Ketika gaya hidup telah dipilih oleh seorang Muslim sebagai jalan hidupnya, maka hal ini akan senantiasa diperjuangkan secara *sustainable* atau berkelanjutan.

Jika gaya hidup telah terikat kuat pada seorang Muslim, maka ketersediaan produk halal sangat dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini bisa menjadi pemicu bagi para produsen halal untuk meningkatkan produksinya, juga melakukan tindakan yang jujur terkait pengadaan produk halal. Jika produsen menghadirkan jaminan produk halal secara sustain pada konsumen , produsen tersebut memiliki resiko besar terhadap berbagai resiko, salah satunya hilangnya kepercayaan dari konsumen.

Ketika gaya hidup telah dipilih oleh seorang Muslim sebagai jalan hidupnya, maka akan senantiasa diperjuangkan secara *sustainable* atau berkelanjutan.

Gaya Hidup Halal Menyasar Kaum Milenial dan Generasi Z?

Gaya hidup halal bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk dari berbagai generasi. Tetapi merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menunjukkan adanya 3 populasi terbesar di Indonesia. Pertama, ada 21,88% atau 58,65 juta populasi generasi x yang berusia 40-55 tahun. Kedua, 25,87% atau sekitar 69,38 juta populasi yang berusia 24-39 tahun yang biasa disebut kaum milenial. Ketiga, generasi Z 27,94% atau 74,93 juta populasi yang berusia 8-23 tahun.

Dari data tersebut, generasi Z memiliki jumlah populasi terbesar, sedangkan kaum Milenial menempati posisi kedua sebagai populasi terbanyak di Indonesia. Apalagi didukung oleh *social media (sosmed)* yang banyak digunakan oleh Kaum Milenial dan Generasi Z. Secara umum, kekuatan *sosmed* mampu membawa ciri dari Kaum Milenial dan Generasi Z untuk menyukai sesuatu yang viral, harga murah atau terjangkau. Sehingga hal itulah yang sebenarnya menjadi gaya hidup para kaum Milienial dan Generasi Z.

Selain itu, kaum Milenial dan Generasi Z memiliki sifat yang sangat pragmatis. Hal ini diperkuat oleh hasil survey yang dilakukan oleh *Indonesia Halal Training and Education Center* (IHATEC) 2022. Dalam hasil survey tersebut, kaum Milenial ketika ditanya terkait dengan persepsi halal dan dijawab secara spontan, hanya terdapat 28% yang mempertimbangkan apakah produk tersebut halal atau tidak ketika hendak membeli produk.

Namun, ketika dihadapkan pada dua produk yang sama tetapi memiliki perbedaan, satu produk memiliki logo halal dan yang lain tidak, mayoritas mau membeli produk dengan adanya logo halal meskipun harganya jauh lebih mahal. Hasil survey tersebut menunjukkan, 86,2% kaum Milenial menanggap bahwa logo halal menjadi sangat penting bagi mereka. Jadi, untuk menyasar semua populasi masyarakat Indonesia baik itu generasi X, Kaum Milenial dan Generasi Z masih terbuka lebar asalkan adanya berbagai perbaikan yang cukup dinamis ke depannya untuk meningkatkan kesadaran gaya hidup halal di masyarakat.

Manfaat Bagi Masyarakat yang Menerapkan Gaya Hidup Halal

Penerapan gaya hidup halal atau *lifestyle* oleh masyarakat bisa dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena gaya hidup tidak hanya bicara soal makanan dan minuman, tetapi bertransaksi dengan jujur juga bagian dari gaya hidup halal.

Apabila gaya hidup halal diterapkan oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dan dilakukan secara kolektif, ini akan menjadi *trend* yang positif dan bermakna Apalagi, bagi seorang Muslim yang menerapkan gaya hidup sehat akan mendapatkan keberkahan karena telah menjalankan aturan Allah SWT. Karenanya menjadi seorang Muslim yang baik merupakan pilihan utama, yang diikuti dengan pilihan gaya hidup yang sesuai dengan komitmen pilihan utamanya.

Cara yang Efektif untuk Mengedukasi Masyarakat soal Gaya Hidup Halal

Edukasi menjadi salah satu upaya yang konkrit untuk mendorong dan meningkatkan gaya hidup halal bagi masyarakat. Hal itu memerlukan berbagai upaya yang efektif untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai gaya hidup halal. Salah satu cara yang dinilai yang efektif unuk mengedukasi masyarakat mengenai gaya hidup halal adalah dengan contoh.

Contoh tersebut bisa dilihat dari perhatian dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika pemerintah melakukan kebijakan mengenai kewajiban halal, maka pemerintah harus memberi contoh. Singkat kata sesuai antara perkataan dan perbuatan. Berbicara kebijakan kewajiban halal untuk produk halal, maka pemerintah harus menerapkan terlebih dulu untuk peduli pada kebijakan yang dicanangkan tersebut. Contoh konkretnya saat rapat/pertemuan/rapat yang menghadirkan penyajian makanan minuman, maka semua K/L sudah menerapkan kebijakan untuk hanya menyajikan makanan minuman yang jelas kehalalannya alias sudah punya sertifikat halal. Karena sedianya pangan halal bisa dikonsumsi oleh semua. Dan aturan ini tidak boleh diisukan sebagai hal yang diskriminatif, karena kewajiban halal sudah menjadi aturan yang diatur oleh Undang undang tanpa pengecualian, kecuali jika memang produk haram maka harus dilabel sebagai label haram.

Elvina menceritakan, ketika itu ada seorang auditor halal bernama Dr. Anton Apriyanto yang kemudiaan menjabat sebagai Menteri Pertanian. Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, Dr. Anton mengeluarkan kebijakan untuk mengganti seluruh konsumsi makan yang belum memiliki sertifikat halal dengan yang sudah memiliki sertifikat halal.

Kebijakan tersebut kemudian mendapatkan reaksi yang positif. Salah satunya kementerian lainnya mengikuti kebijakan tersebut khususnya saat ada aktivitas bersama dengan Menteri Pertanian. Hal itu juga membuat produsen yang sempat dihentikan mamasok makanan ke Kementerian Pertanian yang sebelumnya belum memiliki sertifikasi halal, mau melakukan sertifikasi halal.

Menurut Elvina, dari contoh tersebut menjadi cara yang paling efektif untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan gaya hidup halal. Karena bicara soal halal tidak hanya konsumen, melainkan adanya ekosistem halal. Selain itu,

mencontohkan itu jauh lebih efektif dan bersifat berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gaya hidup halal.

Meskipun, pada awalnya banyak yang akan merasa terpaksa, tatapi hal itu lebih baik dibandingkan ancaman dan hukuman. Terlebih bila kebijakan hukum tidak bisa dilakukan secara konsisten.

Efektivitas Peran Media Sosial dan *Influencer* Dorong Gaya Hidup Halal

Peran media untuk meningkatkan *awareness* atau kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal dinilai sangat efektif, terutama bila hal itu dilakukan oleh para *influencer. Influencer* sendiri merupakan personel atau grup yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan orang lain karena memiliki otoritas, pengetahuan, posisi, atau karena hubungan dengan publik atau audiens.

Media dan *influencer* diharapkan dapat melakukan sesuatu yang cerdas dan tepat untuk menyampaikan konten yang isinya tidak lebay dan bombastis sehingga bisa mempengaruhi masyarakat untuk dapat menerapkan gaya hidup halal. Konten yang disampaikan oleh media dan *influencer* bisa menyampaikan fakta dan pengetahuan, serta mengajak publik bisa berfikir benar terhadap gaya hidup halal yang banyak manfaatnya ini.

Menurut Elvina, hal ini juga merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab media serta influencer untuk menyampaikan fakta dengan objektif yang telah diverifikasi. Tetapi dalam menyasar Generasi X dan Generasi Z memerlukan *figure* atau sosok yang memang menjadi panutan pada generasi tersebut. Media dan *influencer* punya peranan yang sangat efektif dan signifikan dalam memberikan pemahaman dan mendorong agar setiap Muslim menjadikan gaya hidup halal bukan hanya untuk melaksanakan perintah agama, tetapi menjadi kebutuhan dalam hidup sebagaimana ibadah sholat.

Ketika hal itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup, maka seseorang Muslim pasti melaksanakan perintah tersebut. Tetapi dalam hal kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal, tidak hanya fokus untuk menumbuhkan pada konsumen, tetapi juga pada produsen dan *stakeholder* lainnya dalam ekosistem halal. Produsen yang sadar dan menerapkan hal tersebut memilki hormat atau respek terhadap aturan kosumen Muslim dan bertanggung jawab terhadap kesesuaian produknya. Para pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem halal juga harus berkomitmen sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana aturan dan *law enforcement* dijalankan dengan adil. Karena jika tidak maka daya dorong untuk menciptakan gaya hidup halal tidak akan efektif . Saya tidak bisa memungkiri bahwa peran pemerintah sesungguhnya cukup krusial disini, karenanya media dan influencer harus juga memahami kondisi ini, agar media dan *influencer* menjadi *control social* yang handal.

Jika gaya hidup telah terikat kuat pada seorang Muslim, maka ketersediaan produk halal sangat dibutuhkan konsumen. Sehingga bisa memicu para produsen halal untuk meningkatkan produksinya.

Harapan Terhadap Gaya Hidup Halal di Indonesia

Harapannya tercipta iklim dimana jaminan Produk halal dihantarkan oleh produsen yang memiliki integritas . Regulasi terkait implementasi dan pengawasan jaminan produk halal dilakukan secara adil dan penuh integritas, karena seyogyanya jaminan produk halal itu menjadi tanggungjawab pemerintah. Produsen yang telah memiliki sertifikat halal memberikan garansi jaminan produk halal atas produknya.Kompeten otoritas dalam pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia melakukan fungsi pengawasan dan *law enforcement* dengan integritas.

Akhirnya kita berharap agar semua *stakeholder* ekosistem halal harus menjalankan fungsinya dengan kultur halal untuk benar-benar melahirkan ekosistem halal yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam produksi halal, serta memastikan integritas dan kejujuran harus hadir untuk menghasilkan jaminan produk halal . Gaya hidup halal bagi konsumen Muslim bukan hanya sebagai perintah dan pilihan, tetapi juga kebutuhan.

Peran Akademisi dalam Mendorong Inovasi dan Riset di Bidang Sains Halal

Prof. Setiyo Gunawan ST., Ph.D

Ketua Pusat Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Para akademisi di Indonesia ikut berperan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024. Salah satu peranannya yakni dengan terlibat dan mendorong inovasi dan riset di bidang sains halal.

Ketua Pusat Studi Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof. Setiyo Gunawan menyampaikan, tren halal dalam dunia akademisi sudah menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam aspek pendidikan, kata Prof Gunawan, telah terbentuknya program studi, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan Lembaga Sertifikasi Profesi terkait Halal. Perguruan Tinggi juga berperan aktif dalam sosialisasi *halal awareness.* Dalam aspek penelitian, para akademisi telah menerbitkan jurnal halal, teknologi pengujian (autentifikasi) bahan kritis halal, bahan substitusi non-halal, dan pengembangan ekonomi syariah.

Sedangkan dalam aspek pengabdian masyarakat, banyak perguruan tinggi sudah membentuk pusat kajian halal, Lembaga Pendamping Produk Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Zona kuliner Aman dan Sehat (KHAS), dan yang terbaru adalah Toko Bahan Baku (ToBaKu) Halal.

Selain itu, Prof. Gunawan menyampaikan, terbentuknya pusat halal di berbagai instansi telah menjadi bukti bahwa dunia akademisi punya peranan cukup sentral dalam mendukung Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada 2024.

Saat ini, menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pusat halal di Indonesia tercatat berjumlah 220 yang terdiri dari 150 pusat halal dari perguruan tinggi. Kemudian disusul oleh organisasi masyarakat sebanyak 66 pusat halal, dan instansi pemerintah sebanyak 4 pusat halal.

Perlu Adanya Sosialisasi yang Masif agar Menjadi Pokok Bahasan

Ada 3 sektor ekonomi Islam yakni produk halal makanan-minuman halal (*Halal Food*), obat halal (*Halal Pharmaceuiticals*), dan kosmetika halal (*Halal Cosmetics*), keuangan syariah dan gaya hidup halal (wisata ramah Muslim, busana syariah, dan media-hiburan syariah). Meski industri halal telah sering menjadi topik yang diangkat, Prof. Gunawan menuturkan bahwa perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara masif agar tren produk halal bisa menjadi salah satu prioritas bidang dalam pembahasan akademis, sebagaimana pepatah yang mengatakan *money follow the trade* atau uang mengikuti perdagangan.

Prof. Gunawan menjelaskan, sosialisasi tersebut perlu didukung oleh pemerintah dan para tokoh agama sebagai pihak yang paling relevan untuk menyampaikan materi terkait ekonomi Islam kepada para akademisi. Pemerintah, lanjutnya, penyampaiannya harus disertai dengan bukti kebijakan, dan jaminan untuk mendukung industri produk halal, keuangan syariah dan gaya hidup halal.

Prof. Gunawan menambahkan, para tokoh agama memiliki peran sentral untuk menyampaikan terkait dengan ekonomi Islam. Menurutnya, ekonomi Islam (produk halal, keuangan syariah dan gaya hidup halal) sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk menjalankan perintah agama.
Untuk mendorong inovasi dan riset di bidang sains halal di kalangan akademisi, Prof. Gunawan meminta agar pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) yang menaungi Pendidikan Tinggi di Indonesia agar segera membentuk pusat kajian halal sebagai wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Oleh karena itu, perlu adanya surat edaran dari Kemenag dan Kemendikbud agar semua Perguruan Tinggi dibawah naungannya untuk segera membentuk pusat kajian halal," kata Prof. Gunawan kepada Buletin Insight, Selasa (14/11).

Perlu adanya sosialisasi secara masif agar tren produk halal bisa menjadi salah satu prioritas bidang dalam pembahasan akademis.

Hasil Penelitian Akademisi yang Sudah Terimplementasi di Industri dan Masyarakat

Hasil riset dan inovasi baik di bidang sains maupun teknologi yang dilakukan oleh para akademisi dan peneliti di Indonesia sudah banyak yang terimplementasi dalam industri maupun masyarakat. Salah satunya adalah aplikasi SIHALAL yang dipakai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Prof. Gunawan mengungkapkan, dalam membuat aplikasi SIHALAL ini BPJPH menggandeng Departemen dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia (BI) dan *Tim Blockchain, Robotics, and Artificial Intellegence Network* (BRAIN) IPB untuk berkolaborasi.

Selain itu, hasil penelitian tema halal juga telah masuk ke dalam jurnal yang telah berindeks Scopus. Prof. Gunawan menjelaskan, Scopus merupakan salah satu sumber data literatur ilmiah berupa jurnal internasional bereputasi yang dimiliki dan dikelola oleh Elsevier. Pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Tinggi memakai jurnal berindeks Scopus sebagai acuan jurnal internasional yang bereputasi.

Meski sudah ada hasil penelitian tentang halal yang masuk ke jurnal berindeks Scopus, tetapi sedikit jurnal halal dari Indonesia yang terindeks Scopus. Sekedar informasi, berikut persyaratan agar bisa terindeks Scopus.

a. Kebijakan jurnal terkait keanekaragaman distribusi editor dan penulis
b. Banyaknya sitasi di jurnal yang terindeks
c. Kontek atau hasil riset yang orisinil
d. Terbit berkala
e. Bersifat *digital/online*

Akademisi Indonesia Masih Tertinggal Dibanding Malaysia dan Thailand

Meski para peneliti dan akademisi di Indonesia sudah banyak yang mengembangkan inovasi dan riset di bidang sains halal. Namun, jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, kedua negara tersebut dibilang lebih unggul. Prof. Gunawan menyampaikan, hal itu berdasarkan data dari laporan Indikator Ekonomi Islam Global (GIEI), *DinarStandard* 2018-2019, *Tabel DinarStand* 2020-2021, dan *Tabel 4 Dinarstandard* 2021-2022.

"Contoh terkait industri produk halal, ada kemungkinan, kebanyakan kita bangsa Indonesia, menganggap bahwa masalah produk halal itu ranahnya agama saja, tidak ada hubungannya dengan kontribusi ekonomi," sambungnya.

Potensi Indonesia dalam industri halal sangat diperhitungkan. peran ini jangan dilihat sebagai *Captive Market*, tapi mendorong tumbuhnya industri halal Indonesia yang mampu bersaing secara global.

Kendala Akademisi dalam Inovasi dan Riset di Bidang Halal

Prof Gunawan mengatakan, para akademisi telah banyak melahirkan inovasi dan riset di bidang halal. Diantaranya, riset terkait gelatin ikan sebagai substitusi gelatin non-halal, minyak goreng bebas 3 MCPD Ester dan alat deteksi gelatin babi, dan *reagent polymerase chain reaction* (PCR).

Hanya saja, dalam melakukan inovasi dan riset di bidang halal tersebut, masih terkendala hilirisasi. Prof Gunawan menjelaskan, hal tersebut berkaitan dengan profit atau faktor ekonomis. Dimana impor dianggap menjadi opsi yang lebih menguntungkan daripada produksi sendiri. Sehingga, perlu adanya keberpihakan untuk produk-produk dalam negeri.

Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah mampu mendukung riset dan inovasi di bidang sains halal melalui kebijakan seperti adanya tema khusus disetiap pendanaan hibah, baik dana negara maupun dana perguruan tinggi serta keberpihakan bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anak bangsa.

Prof. Gunawan mendorong kepada pemerintah untuk senantiasa memiliki kebijakan yang berperan aktif dalam memajukan industri halal di Indonesia. Hal tersebut bisa dilakukan melalui penghargaan kepada para pelaku industri halal.

"Kebijakan yang berperan aktif dalam memajukan pengembangan industri halal di Indonesia, mulai tahun 2021 ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyelenggarakan *Indonesia Halal Industri Awards*, atau disingkat IHYA. Kegiatan ini sudah bagus, Namun, kegiatan pemberian penghargaan ini di proses finalisasi (hilir), hulunya belum didukung dengan masif," jelasnya.

Integrasi Peran Pemerintah, Industri dan Akademisi

Prof. Gunawan menyampaikan, perlu adanya integrasi dan optimalisasi peran akademisi, pemerintah dan industri, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan industri halal di Indonesia. Para akademisi harus konsisten untuk fokus pada Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pemerintah, fokus pada pembuatan peraturan atau kebijakan agar ekosistem halal bisa terwujud dan berkesinambungan. Sementara industri, para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar memiliki komitmen dan tanggung jawab terkait jaminan produk halal.

"Potensi Indonesia dalam industri halal pada saat ini sangat diperhitungkan, karena Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun peran ini hendaknya jangan hanya dilihat sebagai *captive market* semata, namun harus mendorong tumbuhnya industri halal di Indonesia yang mampu bersaing secara global," pungkasnya.

Menggali Makna: Urgensi Literasi Halal dalam Kehidupan Modern

Muhammad Assagaf

Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Maluku Utara

Ketika kehidupan modern menjadi semakin kompleks, kompetensi halal menjadi semakin penting. Pengetahuan halal adalah kemampuan atau keterampilan individu untuk memperoleh, memahami dan menggunakan informasi mengenai kualitas halal suatu produk atau jasa. Pengetahuan halal berarti memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengambil keputusan yang tepat dalam memilih makanan, minuman dan gaya hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Artikel ini mengeksplorasi mengapa pengetahuan halal sangat penting dalam kehidupan modern kita, sekarang dan di masa depan. Salah satu alasan mengapa pengetahuan halal sangat penting dalam kehidupan modern adalah keselamatan konsumen. Pengetahuan halal berarti mampu menjamin keamanan konsumen saat mengonsumsi produk atau memanfaatkan layanan tertentu. Terkait makanan dan minuman, pengetahuan halal memungkinkan kita menghindari bahan-bahan yang melanggar prinsip halal, seperti daging babi, alkohol, dan atau produk-produk turunannya.

Selain itu, pengetahuan tentang Halal juga merupakan bagian dari pengetahuan agama kita. Dalam Islam, menjaga kehalalan makanan, minuman dan gaya hidup adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Dengan meningkatkan pemahaman kita tentang Halal, kita juga meningkatkan pemahaman dan penerapan ajaran agama. Kita dapat menyelaraskan pilihan kita dengan prinsip-prinsip agama kita dan dengan demikian memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT. Selain itu, pemahaman Halal juga berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Dalam masyarakat yang lebih sadar halal, pelaku ekonomi akan lebih tertarik untuk memproduksi produk atau jasa halal. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik tentang Halal akan menganggap Halal sebagai faktor penting dalam memilih produk dan jasa yang dikonsumsinya. Hal ini akan menciptakan pasar yang lebih besar bagi produk atau jasa halal sehingga membuka peluang bisnis yang lebih baik bagi para pelaku ekonomi.

Meningkatkan pengetahuan tentang Halal juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Orang yang memiliki tingkat pengetahuan Halal yang tinggi akan lebih peduli terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat. Mereka akan berusaha untuk memberikan jaminan produk atau layanan halal kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan mereka. Menghadapi tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat modern, pemahaman Halal dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda. Selain itu, meningkatkan pemahaman halal juga memerlukan pendidikan dan kesadaran yang lebih luas. Pengetahuan halal tidak hanya penting bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku ekonomi, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Pendidikan literasi halal harus dimulai sejak usia dini, di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Pelaku perekonomian harus terus belajar dan mengembangkan pengetahuannya tentang Halal untuk mampu menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan prinsip Halal. Pemerintah juga mempunyai peran penting dalam mengatur dan memantau kehalalan produk atau jasa yang ada di pasar.

Lebih lanjut kita dapat menegaskan bahwa pendidikan dan kesadaran akan literasi Halal penting tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku ekonomi, pemerintah, dan lembaga Pendidikan serta seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang Agama, suku dan ras. Bagi konsumen, pendidikan dan kesadaran tentang pengetahuan Halal membantu mereka membuat pilihan yang tepat ketika memilih produk atau layanan Halal. Dengan pengetahuan yang cukup, konsumen dapat membaca label dengan bijak, memahami informasi halal, dan memastikan produk yang dikonsumsi sesuai dengan ajaran agamanya. Bagi pelaku ekonomi, pendidikan dan kesadaran akan pengetahuan halal sangat membantu untuk memahami kebutuhan pasar. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menginginkan produk atau jasa halal, maka para pengusaha dapat memanfaatkan pengetahuan halal tersebut untuk mengembangkan dan menghasilkan lebih banyak produk atau jasa yang memenuhi permintaan pasar. Dengan cara ini, mereka dapat menjaga kelangsungan bisnis dan tetap relevan dalam lanskap yang semakin kompetitif.

Pada saat yang sama, bagi pemerintah, aspek pendidikan dan kesadaran literasi halal penting untuk mengatur dan memantau pasar. Dengan pemahaman yang baik tentang pengetahuan halal, pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung pengembangan produk atau layanan halal. Selain itu, mereka juga dapat menerapkan peraturan terkait sertifikasi halal dan memastikan perlindungan konsumen terhadap produk atau jasa halal yang beredar di pasar. Demikian pula bagi institusi pendidikan, pendidikan dan kesadaran halal dapat menjadi bagian dari program ini. Dalam pendidikan formal, lembaga pendidikan mungkin menawarkan kursus atau program khusus yang membantu siswa memahami pentingnya halal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat menjadi tempat diadakannya seminar, workshop atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan ilmu halal bagi masyarakat luas.

Melalui pendidikan yang lebih baik dan kesadaran akan pengetahuan Halal, kita dapat bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya Halal dalam kehidupan modern. Dengan mengintegrasikan pengetahuan Halal dengan pendidikan dan kesadaran, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pilihan makanan, minuman, dan gaya hidup kita. Hal ini akan berdampak positif pada kesehatan, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan kita sebagai umat Islam. Dengan kata lain, literasi halal sangat penting dalam kehidupan modern. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang Halal, kita dapat melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, meningkatkan keberagaman agama, mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan tanggung jawab sosial, serta mempromosikan pendidikan dan kesadaran Halal dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat modern harus menyadari pentingnya pemahaman Halal dan melakukan upaya peningkatan pengetahuan mengenai hal tersebut. Dengan demikian kita dapat menjaga keutuhan dan keberlangsungan hidup kita sesuai dengan prinsip agama Islam yang kita anut.

Kewajiban Sertifikat Halal Membuat Industri Kesehatan Semakin Menjamin Kebaikan

Drs. R. Bambang Irawan, Apt.

GM *Quality Operation* dan Penyelia Halal PT Phapros Tbk

Pemerintah mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan baik itu makanan, minuman, obat-obatan, dan produk untuk bersertifikat halal pada tahun 2024. Hal ini salah satunya diatur melalui Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.

Salah satu pelaku industri kesehatan yang menerapkan halal yakni PT Phapros Tbk. Kepada Buletin Insight, GM *Quality Operation* dan Penyelia Halal PT Phapros Tbk, Bambang Irawan mengatakan, implikasi dari aturan kewajiban halal khususnya bagi industri kesehatan secara internal meningkatkan pemahaman dan kesadaran manajemen serta karyawan untuk semakin menjamin kebaikan.

"Jaminan kemantapan dan kebaikan (*thoyyib*) bagi konsumen yang mayoritas beragama Islam untuk menggunakan produk farmasi / obat disamping jaminan khasiat, keamanan dan kualitas produk sesuai standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik)," kata Bambang, Minggu (5/11/2023).

Bambang menambahkan, aturan kewajiban halal juga akan memperkuat sistem mutu yang sudah ada dan berjalan. Hal ini karena prinsip halal sangat sejalan dan sinergi dengan prinsip dalam pembuatan obat yaitu selalu menjaga kebersihan personal, fasilitas produksi dan mencegah kontaminasi silang.

"Serta keterlusuran atau *traceability* mulai dari penggunaan bahan awal, selama proses produksi sampai dengan distribusi ke konsumenyang harus terdokumentasi dengan baik dan benar," sambungnya.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan, aturan tersebut juga berdampak pada *stakeholder* eksternal industri farmasi untuk menarapkan prinsip halal. Hal ini bisa dilihat dari para *supplier* bahan awal baik bahan baku maupun kemas yang dapat menyuplai bahan yang bersumber dari bahan halal.

Tidak hanya berasal dari bahan yang halal, bahan tersebut juga diproses dengan prinsip jaminan mutu halal. Sehingga, hal ini juga mendorong lembaga halal negara sebagai produsen bahan tersebut untuk melakukan berbagai upaya kolaborasi dengan lembaga halal negara tujuan ekspor bahan tersebut.

Dampak eksternal *stakeholder* industri farmasi yaitu mendorong *suplier* bahan awal, baik bahan baku maupun kemas untuk dapat men-*supply* bahan yang bersumber dari bahan halal dan diproses dengan prinsip jaminan mutu halal. Hal ini juga akan mendorong Lembaga halal negara sebagai produsen bahan tersebut untuk melakukan upaya kolaborasi dengan lembaga halal negara tujuan ekspor bahan tersebut.

Aturan kewajiban halal memperkuat sistem mutu yang sudah ada dan berjalan. Prinsip halal sangat sejalan dan sinergi dengan prinsip pembuatan obat.

Tantangan yang dihadapi industri farmasi dalam menerapkan prinsip halal?

Meski berdampak positif, Bambang menyampaikan, dalam menerapkan prinsip halal pada industri kesehatan seperti farmasi ini memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah soal waktu dan biaya. Bambang menjelaskan, penyeusaian komposisi obat yang halal dapat memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena harus mengulang beberapa formulasi dan pengujian.

Bambang mengungkapkan, dalam menerapkan prinsip halal tersebut melahirkan kompetisi yang cukup tinggi dengan negara-negara pesaing dalam sektor industri farmasi. Bahkan, negara-negara tersebut juga berasal dari mayoritas penduduknya non-Muslim seperti Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang.

"Perbedaan standar halal, perbedaan ini membuat industri farmasi kesulitan meminta atau mengatur negara lain agar memproduksi bahan baku atau memberikan dokumen jaminan halal. Infrastruktur belum optimal, belum ada sistem logistik (rantai pasok) halal, laboratorium pengujian halal belum banyak, dukungan *utility* (Instalasi pengolahan air baku) untuk industri halal," ungkapnya.

Selain itu, salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pelaku industri farmasi dalam menarapkan prinsip halal adalah tekanan harga. Karena adanya *market competition* pada sistem pengadaan obat pemerintah melalui tender *e-katalog* yang sangat menekan harga obat setiap tahun. Juga adanya jaminan pasar karena belum ada *advantage* (keuntungan) dari produk farmasi halal.

PT Phapros Tbk merupakan salah satu perusahaan farmasi yang memproduksi produk farmasi halal, bagaimana cara memastikan atau mencari *supplier* bahan baku obat yang halal?

Bambang mengatakan, PT Phapros Tbk memiliki mekananisme internal untuk bisa memastikan bahwa produk farmasi yang diproduksi dijamin halal dan *thoyyib* (kebaikan), yakni dengan mencari dan memastikan bahwa *supplier* bahan baku obat itu halal.

Hal ini sesuai dengan produsen perusahaan didalam mencari *supplier* bahan baku obat yang sebagian besar atau 90% masih impor. Prosuden tersebut salah satunya dengan melakukan kualifikasi *supplier* bahan baku yang meliputi aspek administrasi seperti produsen harus bisa menunjukkan bahwa *supplier* tersebut adalah agen resmi di Indonesia.

Dalam aspek operasionalnya, PT Phapros Tbk juga memeriksa aspek operasional atau legalitasnya dengan adanya sertifikat CPOB, melakukan audit atau inspeksi ke fasilitas produksi terhadap pemenuhan GMP lokal atau negara, hasil inspeksi lembaga pengawasan mutu dan halal setempat untuk memastikan kontinuitas kualitas bahan baku, dan melakukan verifikasi daftar positif yang dikeluarkan oleh Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Bambang menyebut, kini PT Phapros Tbk telah memiliki produk bersertifikasi halal sebanyak 115 produk dan 1 alat kesehatan. "Pengukuran langsung produk halal PT Phapros Tbk menjadi substitusi produk non halal dari pesaing belum

pernah dilakukan, hanya kalau saja dilihat dari pertumbuhan penjualan per produk terutama yang alkes *Bonefill* meningkat 200% / tahun," sambungnya.

Bambang mengungkapkan, produk halal alat kesehatan *Bonefill* yang diproduksi oleh PT Phapros Tbk ini memiliki keterkaitan dengan Rumah Potong Hewan (RPH) yang bersertifikat halal. Hal ini dikarenakan bahan utama dari alat Kesehatan sejenis *Scaffold* (pengganti tulang) yaitu *Hirdroxy Appetite* dari *Bovine* (tulang bonggol) salah satu bagian dari hewan sapi.

Menerapkan prinsip halal melahirkan kompetisi yang cukup tinggi dari Negara pesaing dalam industri farmasi. Bahkan, diantara Negara tersebut berasal dari mayoritas penduduknya non Muslim seperti Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang.

Apakah setelah adanya UU JPH berdampak pada permintaan produk farmasi halal?

Bambang mengatakan, setelah adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membuat permintaan di industri kesehatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Permintaan tersebut paling dominan pada segmen pasar rumah sakit.

"Pasar rumah sakit seiring dengan meningkatnya kesadaran manajemen dan tenaga kesehatan serta medis di rumah sakit atas penggunaan obat dan alkes halal untuk pencegahan dan pengobatan serta adanya dorongan langsung dari pasien di rumah sakit tersebut, Juga semakin bertambahnya rumah sakit yang menerapkan sistem pengelolaannya berbasis syariat," ungkapnya.

Bagaimana preferensi rumah sakit atau dokter terhadap obat - obatan dan alat kesehatan halal?

Bambang menuturkan, preferensi rumah sakit atau dokter terhadap obat-obatan dan alat kesehatan halal direspon dengan sangat baik. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen perusahaan disamping menjaga keamanan, khasiat dan mutu obat sesuai CPOB.

“Juga kehalalan atau terpenuhinya prinsip syariah dalam proses produksinya. Penggunaan label halal pada kemasan produk obat dan alkes juga ikut memberikan keyakinan bagi rumah sakit atau dokter ketika akan menggunakan atau merekomendasi produk tersebut,” jelasnya.

Apakah ada segmen masyarakat tertentu yang telah sadar terhadap obat - obatan dan alat kesehatan halal terlepas dari UU JPH?

Menurut Bambang, ada kelompok masyarakat yang telah lama sadar untuk menggunakan produk halal dalam industri Kesehatan dan farmasi ini. Kelompok masyarakat tersebut biasanya tergabung dalam himpunan atau organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia (MUKISI).

“Beranggota Rumah sakit- rumah sakit yang ada di Indonesia. Forum-forum majelis taklim atau pengajian di tingkat masjid-masjid, lembaga-lembaga *tour* dan *travel* penyelenggara haji dan umroh untuk pengadaan obat dan alkesnya,” sambungnya.

Pengembangan Industri Kesehatan Berkompetensi Syariah

Industri kesehatan berkompetensi syariah merupakan sebuah ekosistem dan tidak hanya melibatkan institusi penyedia layanan kesehatan berkompetensi syariah seperti rumah sakit, namun juga industri lain diantaranya; farmasi halal; makanan dan minuman halal; serta tenaga kesehatan.

72 RS
berkomitmen berkompetensi syariah atau sebanyak

2,3%
dari total RS yang beroperasi di Indonesia

30 RS
sudah bersetifikat syariah

Sumber : Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI)

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI)

merupakan suatu organisasi yang menghimpun penyelenggara kesehatan Islam, bersifat bebas dan tidak semata – mata mencari keuntungan, dijiwai dengan semangat dalam mewujudkan upaya kesehatan yang profesional, bermutu dan Islami.

Tujuan MUKISI

- Meningkatkan mutu penyelenggaraan layanan Kesehatan yang islami
- Pengembangan kemampuan SDM anggota
- Meningkatkan derajat kesejatan masyarakat dalam sistem Kesehatan Nasional

Sekitar 500 rumah sakit di Indonesia tergabung di dalam MUKISI sebagai anggota

31 Rumah Sakit telah mendapatkan sertifikat kompetensi syariah dari DSN MUI,

42 Rumah Sakit masih dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi Syariah MUI

Kondisi Global & Nasional Farmasi Halal

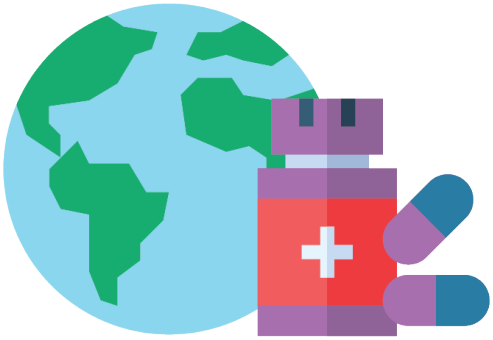

$122 Milyar
Konsumsi Farmasi Halal global

$131 Milyar
Perkiraan peningkatan pada tahun 2023

Pada 2023, diperkirakan pasar global farmasi halal akan naik sebesar 7.1% menjadi **$131 miliar.**

Sumber data: Global Islamic Economy (GIS) Report 2022

Adapun Total Pasar Farmasi di Indonesia (termasuk obat-obatan Covid-19), sebesar **$11,5 miliar**

Dengan tingkat pertumbuhan gabungan (CAGR) sebesar **7%**

Sumber data: Laporan IQVA MAT Q2-2023.

Pasar Farmasi Indonesia

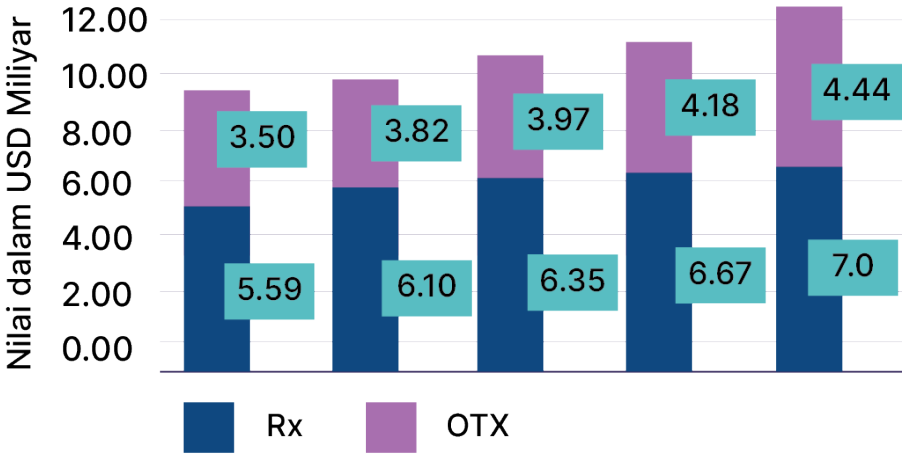

Sumber data: Laporan IQVA MAT Q2-2023.

Belanja Kesehatan Per Kapita di ASEAN

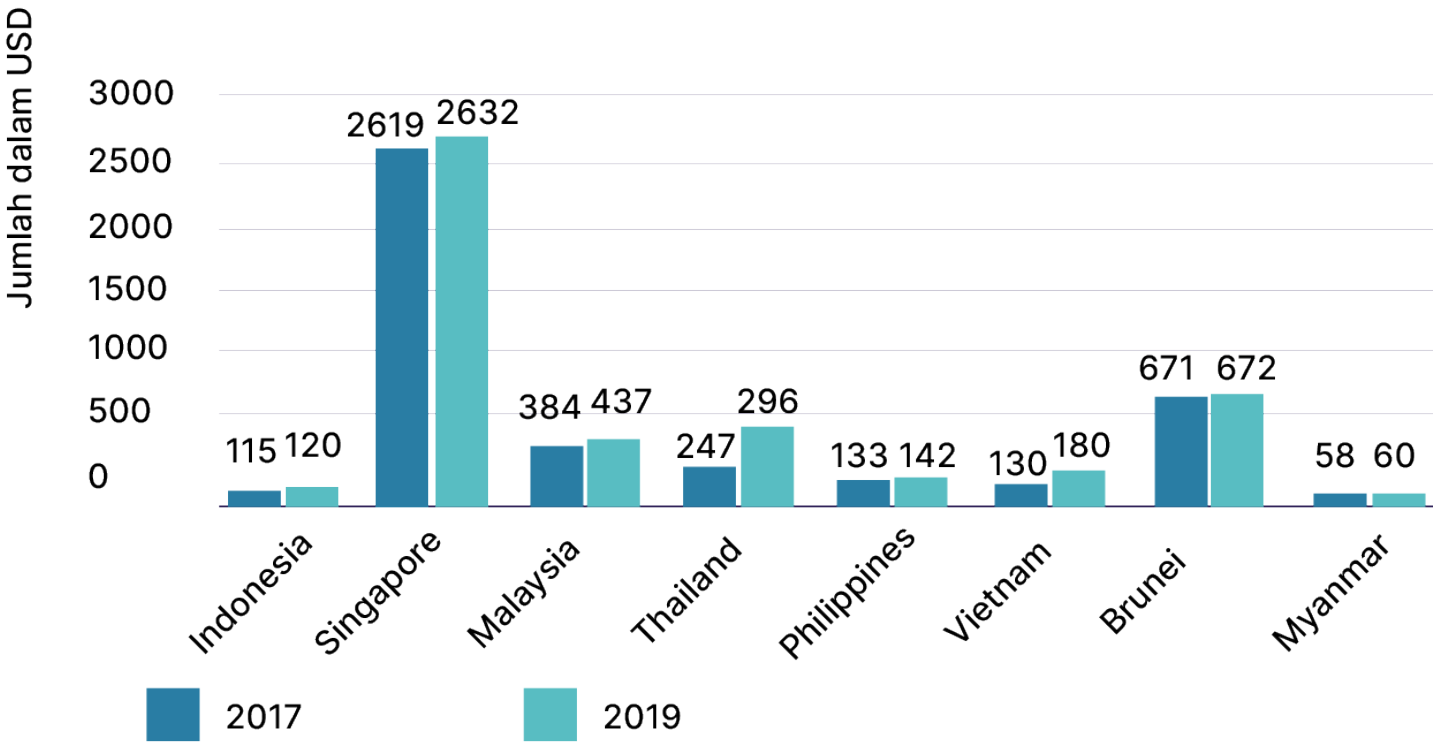

Sumber : Healt speading per capita, The Global Economy

Konsumsi farmasi di Indonesia saat ini adalah IDR 350.000 per kapita per tahun.

Angka ini terbilang masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (terlihat dari belanja kesehatan per negara di kawasan ASEAN)

Produk Farmasi Beredar di Indonesia

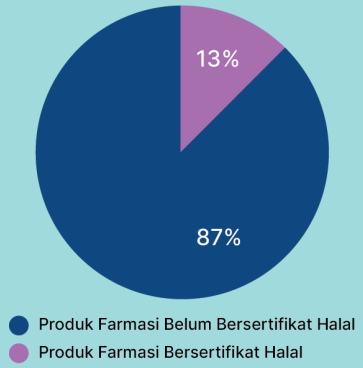

Sumber : MUI

Dari ± 22.000 produk farmasi beredar di Indonesia, hanya sekitar 13% (2.600) yang memiliki sertifikat halal.

Indonesia mengimpor **90% bahan baku obat (BBO).** Sebagian besar **BBO impor belum bersertifikat halal.**

Jenis Produk Farmasi, Alkes, Produk Biologi

Bersertifikasi Halal

Per 08 Desember 2023

No	Jenis Produk	Jumlah SH	Jumlah Produk
1	Alat Kesehatan	56	921
2	Bahan Obat	14	467
3	Jamu dan Obat Tradisional	340	6,266
4	Obat Bebas	32	184
5	Obat Bebas Terbatas	46	536
6	Obat Keras Dikecualikan Narkotika dan Psikotropika	63	1,153
7	Obat Kuasi	18	112
8	Obat Tradisional	2,243	14,577
9	Obat-Obatan dan Vaksin	135	3,695
10	Produk Biologi	78	1,250
11	Suplemen	111	1,195
12	Suplemen Kesehatan	234	3,055
13	Vitamin, Mineral dan Zat Gizi Lainnya	36	446
	Jumlah	3.406	33.857

(Sumber: SIHALAL, BPJPH 8/12/23)

Terdapat ***trend*** **peningkatan akan kebutuhan** untuk medapatkan produk obat, dan farmasi halal di kalangan masyarakat, sehingga perlu lebih didorong **penerapan konsep *halal by design* saat pengembangan produk baru,** dan juga merupakan strategi *branding* atau *competitive advantage.*

Faktor-Faktor Pendorong Peningkatan Konsumsi Farmasi di Indonesia

- Pertumbuhan jumlah penduduk
- Perbaikan sistem jaminan kesehatan
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan

Program KNEKS dalam Pengembangan Industri Kesehatan Berkompetensi Syariah

Kajian terkait industri kesehatan berkompetensi syariah

Kesiapan Infrastruktur Rumah Sakit & Ekosistem Industri Kesehatan dalam menghadapi UU Jaminan Produk Halal

Riset Preferensi Pasar terhadap Layanan Rumah Sakit Berkompetensi Syariah.

Aktivitas Strategis

- Penyampaian policy recommendation terkait pengembangan industri kesehatan berkompetensi syariah.
- Koordinasi dan diskusi dengan stakeholders terkait untuk pengembangan industri kesehatan berkompetensi syariah.
- Sosialisasi terkait industri kesehatan berkompetensi syariah kepada masyarakat Indonesia.

Implikasi UU JPH No. 33 terhadap Industri Farmasi

"Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa **produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal**"

Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tahap 2
(Berlaku mulai 17 Oktober 2021)
Produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan

Tahap 1
(Berlaku mulai 17 Oktober 2019)
Produk makanan minuman dan produk jasa hasil sembelihan

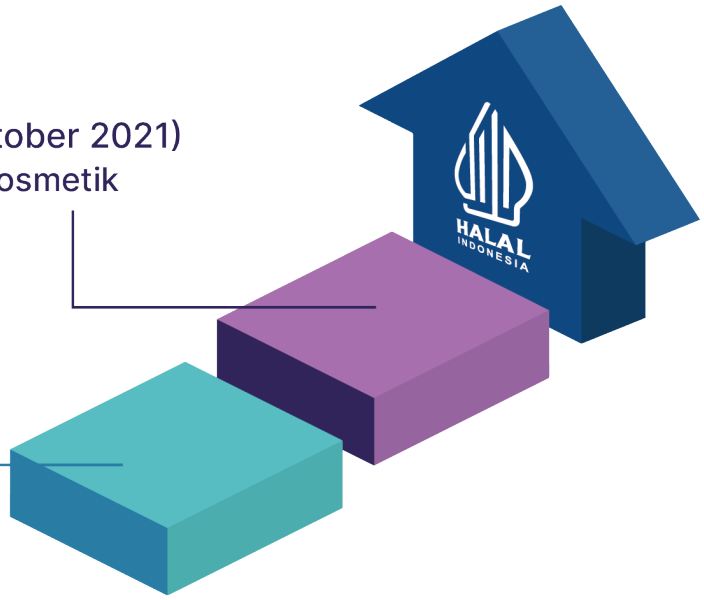

Penahapan kewajiban sertifikasi halal sejak UU JPH diberlakukan

Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan
17 Oktober 2019-17 Oktober 2024
PP No.39/2021 pasal 140

Obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
17 Oktober-17 Oktober 2026
PP No.39/2021 pasal 141

Kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik
17 Oktober 2021-17 Oktober 2026
PP No.39/2021 pasal 141

Obat bebas dan obat bebas terbatas
17 Oktober 2021-17 Oktober 2029
PP No.39/2021 pasal 141

Obat Keras dikecualikan psikotoprika
17 Oktober 2021-17 Oktober 2034
PP No.39/2021 pasal 141

Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris
17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2026
PP No.39/2021 pasal 141

Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan pribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor
17 Oktober 2021-17 Oktober 2026
PP No.39/2021 pasal 141

Alat kesehatan risiko A
17 Oktober 2019-17 Oktober 2026
PP No.39/2021 pasal 141

Alat kesehatan risiko B
17 Oktober 2019-17 Oktober 2029
PP No.39/2021 pasal 141

Alat kesehatan risiko C
17 Oktober 2019-17 Oktober 2034
PP No.39/2021 pasal 141

Alat kesehatan risiko D
17 Oktober 2019-17 Oktober 2039
Perpres No.6/2023 pasal 13

Produk Biologi
17 Oktober 2019-17 Oktober 2039
Perpres No.6/2023 pasal 13

Implementasi Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan

Sumber: Perpres No.6/2023

Obat, Produk Biologi, dan alat kesehatan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Zat yang dikecualikan dari sertifikasi halal
Narkotika dan Psikotropika

Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang disertifikasi halal harus berasal dari bahan halal, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlakuan pada kasus khusus

Obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang belum berasal dari bahan yang halal dan cara pembuatannya yang belum halal masih dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, dengan syarat:

- Mencantumkan informasi bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi/pendaan produk.
- Jika berasal dari bahan halal namun cara pembuatannya belum halal, maka mencantumkan informasi berupa tulisan, "berbahan halal dan dalam upaya memenuhi proses halal" yang dicantumkan pada penandaan produk.

Obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang belum bersertifikat halal masih dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dengan tahapan sertifikasi halal.

ketentuan lebih lanjut dan detail akan diatur dalam Peraturan Menteri

UPAYA PENINGKATAN LITERASI PRODUK HALAL MELALUI SINERGI HALAL *LIFESTYLE* DAN MEDIA

Andrian Haro

Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta
Pendamping Proses Produk Halal (PPH),
Universitas Indonesia Halal Center

Menurut laporan *World Halal Summit* tahun 2022, industri halal Indonesia diproyeksikan mencapai total nilai pasar sebesar Rp 220 triliun (sekitar 15 miliar dolar AS) pada tahun 2021, yang merupakan 9% dari PDB negara. Indonesia merupakan pasar utama bagi produk halal global, dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan posisinya. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, angka yang ada saat ini masih jauh untuk mendorong Indonesia menjadi yang terdepan dalam produksi halal global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia masih sangat bergantung pada impor produk halal. Dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, Indonesia memiliki tingkat konsumsi tertinggi, menjadikannya pemain penting dalam lanskap perdagangan halal global. Oleh karena itu, agar Indonesia dapat meningkatkan perekonomian globalnya di masa depan, pemerintah harus secara proaktif memimpin upaya untuk mendorong pertumbuhan industri halal.

Mengingat kondisi masyarakat dan pola demografi saat ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin pasar halal global dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Prospek ini berakar pada status Indonesia sebagai rumah bagi 225 juta umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, dengan basis pengguna media sosial yang saat ini melebihi negara lain sebanyak 167 juta jiwa, Indonesia mempunyai keunggulan strategis. Faktor-faktor ini mempunyai potensi untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk halal global di masa depan. Dinamika yang diuraikan di atas dapat menjadi model praktis untuk menerapkan strategi guna meningkatkan kesadaran dan pengakuan merek halal di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini sesuai dengan tujuan utama yang dijabarkan dalam *Masterplan* Industri Halal Indonesia 2023–2029.

Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia, tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia meningkat dari 16,3 persen pada tahun sebelumnya menjadi 20,1 persen pada tahun 2021. Mengingat status Indonesia sebagai populasi Muslim terbesar di dunia, persentase tersebut tergolong rendah dan diperlukan upaya intensif. Meski memiliki populasi Muslim tertinggi secara global, tidak semua umat Islam di Indonesia menganut gaya hidup Islami. Ketidakpedulian masyarakat

Masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal bermula dari rendahnya tingkat literasi terhadap produk-produk halal tersebut. Akibatnya, isu halal masih menjadi pertimbangan kecil dalam sektor ini. Kurangnya permintaan terhadap produk bersertifikat halal menyebabkan produsen makanan Indonesia meremehkan tantangan yang terkait dengan izin halal, meskipun mereka tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Kelangkaan barang-barang bersertifikat halal di Indonesia menegaskan situasi ini dan menghadirkan kenyataan yang memprihatinkan. Pentingnya bagi masyarakat Muslim untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang

produk-produk halal, terutama mengingat kewajiban Islam untuk mengkonsumsi makanan halal.

Upaya meningkatkan literasi mengenai gaya hidup halal sangat penting bagi masyarakat Muslim Indonesia. Berbagai tindakan dapat dilakukan untuk memobilisasi, memperkuat, dan menggali pemahaman dan kesadaran tentang gaya hidup halal yang bertujuan untuk memperkuat literasi dan komunitas Muslim di Indonesia. Konsep halal telah berkembang lebih dari sekedar makanan dan sangat penting untuk memastikan status halal dari kebutuhan komunitas Muslim di berbagai sektor industri. Menjelajah hingga aspek gaya hidup menghadirkan peluang dan potensi besar bagi pasar halal global. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan industri halal yang cukup pesat belakangan ini.

Saat ini, sejumlah besar umat Islam di Indonesia dan dunia sudah menerapkan gaya hidup halal. Halal mencakup makanan dan praktik yang diperbolehkan bagi umat Islam. Awalnya berpusat pada makanan, minuman, dan bahan konsumsi tubuh, istilah "halal" telah memperluas cakupannya dan terus berkembang. Hal ini kini meresap ke dalam setiap aspek kehidupan seorang Muslim, tidak hanya sekedar pilihan makanan, namun juga memengaruhi berbagai aspek aktivitas sehari-hari mereka.

Potensi penerapan gaya hidup halal sangat penting bagi masyarakat Indonesia dalam skala global. Berdasarkan data Laporan *Global Islamic Economy* (GIE), Indonesia menempati posisi keempat dalam nilai *Global Islamic Economy* (GIE) pada tahun 2022. Hal ini mendasari peningkatan ketersediaan produk halal di berbagai industri, termasuk sektor perbankan. Industri seperti makanan, perbankan syariah, *travel, fashion,* media dan rekreasi, farmasi, dan kosmetik diperkirakan akan berkembang seiring dengan meningkatnya gaya hidup halal. Selain itu, terdapat peningkatan niat masyarakat terhadap produk halal selain makanan dan minuman, termasuk produk dan layanan keuangan.

Taktik utama dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan antusiasme masyarakat dalam menerapkan gaya hidup halal dalam rutinitas sehari-hari adalah dengan memperkuat literasi gaya hidup halal melalui media sosial. Sudah menjadi rahasia umum bahwa media sosial memegang posisi penting dalam kehidupan mayoritas semua orang, terutama kaum muda karena dianggap sebagai kebutuhan penting bagi semua orang. Menurut survei *We Are Social,* masyarakat Indonesia menghabiskan tiga jam delapan belas menit setiap hari di media sosial. Data ini menempatkan Indonesia pada urutan kesepuluh tertinggi secara global dalam hal pengguna aktif media sosial. Pemerintah dapat memanfaatkan tren ini untuk mensosialisasikan promosi sosial dan gaya hidup halal, khususnya di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dicapai melalui beragam konten promosi yang menarik dan informatif di seluruh *platform* media sosial populer di Indonesia.

Dengan menggunakan metode yang kreatif, ekstensif, dan berkelanjutan, hal ini berpotensi membangkitkan rasa ingin tahu dan seiring berjalannya waktu mampu mendorong terbentuknya praktik atau tren gaya hidup halal di masyarakat luas, terutama pada generasi muda. terbentuknya praktik atau tren gaya hidup halal di masyarakat luas, terutama pada generasi muda. Untuk meningkatkan kesadaran gaya hidup halal secara efektif, pemerintah dan entitas terkait harus meningkatkan kehadiran mereka di media sosial. Pendekatan yang menarik untuk menanamkan kesadaran akan gaya hidup halal, terutama di kalangan generasi muda, melibatkan penyampaian konten kreatif dan mendidik melalui beragam media seperti infografis, film pendek, *podcast, meme*, webinar, esai, dan banyak lagi. Hal ini dapat mencakup kegiatan promosi, seperti mengiklankan sertifikasi halal atau program pelatihan untuk badan usaha, selaras dengan pengenalan produk halal terbaru.

Selain konten yang informatif dan bernilai, penting bagi pemerintah untuk menyesuaikan pendekatannya terhadap segmentasi pengguna atau komunitas di semua *platform* media sosial di Indonesia, untuk memastikan terciptanya materi yang menarik. Memanfaatkan peluang yang ada di era digital sangatlah penting, khususnya dalam mendidik komunitas Muslim tentang literasi produk halal melalui teknologi digital, seperti media sosial. (AH)

"Menyatukan langkah, Memajukan Negeri"

"Kebaikan untuk Semua"

@kneks_id @kneks_id @kneks.id www.kneks.go.id

Diterbitkan oleh:

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Komplek Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda II Lantai 17
Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710, Indonesia